

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Program Terus Berlanjut Meski APBD-P Turun

Gambir, Warta Kota

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meleset dalam memproyeksikan nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Akibatnya, nilai APBD-Perubahan 2019 yang disepakati antara eksekutif dan legislatif menurun sekitar Rp 2,5 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pengurangan anggaran pada perubahan itu disebabkan oleh hitungan Silpa 2018 yang diprediksi Rp 12 triliun menjadi Rp 9,5 triliun. Angka ini diperoleh setelah pemerintah kembali melakukan audit terhadap anggaran tersebut.

"Ini tren baru, di mana Silpa pemerintah makin tahun makin berkurang. Semakin Silpa pemerintah berkurang, maka ruang pada penambahan perubahan (APBD-P) juga berkurang," kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu (14/8).

Anies memastikan, penurunan anggaran tidak akan berdampak pada implementasi program-program prioritas Pemprov DKI Jakarta. Anies berharap perencanaan anggaran ke depan harus lebih baik agar penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta semakin baik.

"Artinya penyerapan anggaran juga semakin bagus, sehingga Silpa semakin sedikit," imbuhnya. Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta menyepakati nilai APBD Perubahan 2019 menjadi Rp 86,9 triliun. Angka ini turun dari nilai APBD murni 2019 menjadi Rp 89 triliun.

Meski nilainya turun, namun Anies memastikan pelaksanaan kegiatan Formula

Semakin Silpa pemerintah berkurang, maka ruang pada penambahan perubahan (APBD-P) juga berkurang.

**Anies Baswedan
Gubernur
DKI Jakarta**

E di Jakarta pada 2020 tetap terlaksana. Pemerintah DKI telah menyiapkan dana sekitar 20 juta Poundsterling atau setara Rp 346,6 miliar untuk ajang olahraga yang menggunakan mobil listrik tersebut.

Anies yakin, pelaksanaan kegiatan ini justru berimplikasi pada roda perekonomian Indonesia khususnya DKI. Berdasarkan kajian sementara, diprediksi pergerakan perekonomian pada ajang itu bisa mencapai Rp 1,2 triliun.

"Itu yang langsung terasa di Jakarta, karena itu, saat saya lapor ke Presiden memang merespons bahwa event ini menguntungkan Jakarta, apalagi bisa mendapat ekspos dari dunia," ungkap Anies.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Pemprov DKI Jakarta harus melaksanakan proses penyusunan Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, mulai

dari pembahasan rancangan KUPA dan rancangan PPAS kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk dibahas dan disepakati bersama. Hal ini menjadi dasar bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019. (suf)

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Program Terus Berlanjut Meski APBD-P Turun

KUA-PPAS APBD-P 2019

- Awal pengajuan Rp 89 triliun
- Masuk ke pembahasan Badan Anggaran turun menjadi Rp 2,5 triliun
- Nilai terbaru APBD Perubahan Rp 86 triliun
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 50,481
- PAD turun Rp 145,452 miliar
- Belanja tidak langsung (BTL) Rp 33.106 triliun
- BTL diturunkan Rp 1,403 triliun
- Belanja langsung (BL) Rp 44.436 triliun
- BL diturunkan Rp 1,955 triliun
- BL dan BTL defisit Rp 3,216 triliun

Penyertaan Modal untuk BUMD DKI

- PT MRT Rp 4.413 triliun
- PT Jakpro Rp 1,2 triliun
- Pembangunan Sarana Jaya Rp 800 miliar
- PD PAM Jaya Rp 385 miliar
- Pemberian pinjaman daerah Rp 350 miliar
- Pembayaran utang pokok Rp 33 miliar

Pergelaran Formula E Berdampak Ekonomi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung pelaksanaan Formula E di Jakarta pada 2020. Legislator itu menyebut, kegiatan tersebut merupakan terobosan yang positif untuk membangun DKI Jakarta.

"Kami juga *kan* berpikiran ke depan, ayo membangun Jakarta dari semua sisi. Dari pariwisatanya, kebudayaannya, mungkin dari pembangunannya. Itu tujuannya menghadirkan suatu pendapatan," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pada Rabu (14/8).

Dalam kesempatan itu, Prasetyo bercerita mengenai pengalamannya saat menonton Formula di negara Singapura. Kata dia, tarif hotel yang awalnya Rp 5 juta per malam, justru

naik menjadi Rp 10 juta karena adanya ajang bergengsi itu. "Dari sisi perekonomian, tentu akan berdampak positif bagi DKI," ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp 346 miliar untuk pelaksanaan Formula E hanya digunakan untuk *Down Payment* (DP). Namun dibalik itu DKI akan mendapatkan pemasukan juga, termasuk menjadi tuan rumah Formula E.

"Pandangan saya Jakarta terlalu ikut politik *banget* juga capek. Jadi kegiatan itu *nggak* ada salahnya juga. Itu bukan hal yang negatif, justru bisa menaikkan pendapatan," ujar Prasetyo.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ahmad Firdaus mengatakan, anggaran Rp 345 miliar itu

bertambah menjadi Rp 360 miliar setelah disesuaikan kurs dari euro ke Poundsterling. Dia menilai bahwa besaran anggaran tersebut didapatkan dari pihak Formula E.

Dia pun belum dapat merinci penggunaan anggaran tersebut. "Mereka yang memperkirakan kira-kira segini, *kan* hitungannya pakai Poundsterling. Dan itu yang nanti akan kami tanyakan tentunya, ini untuk apa aja sih. *Kan* belum tahu. Ini yang masih jadi pembahasan terus," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Firdaus juga belum dapat menyebutkan lokasi dan lintasan yang akan dijadikan ajang balap Formula E, lantaran belum ada keputusan dari pihak penyelenggara dan Pemprov DKI Jakarta. **(suf)**